



Aksesibilitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan Bagi ABK: Studi Terhadap Implementasi Sekolah Inklusi

Accessibility of Educational Facilities and Infrastructure for Children with Disabilities: A Study on the Implementation of Inclusive Schools

Alfonsius Jogbakci¹, Nazma Aliya², Inayah Kenia Pratiwi³, Nabila Surbakti⁴, Romiana Situmorang⁵, Yosika Silaen⁶, Yuni Yolanda Situmorang⁷, Anggia Puteri⁸, Lili Tansliova⁹

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

Email : yogbakcia@gmail.com¹, nazmaaliya1602@gmail.com², inyhprtwwi1805@gmail.com³, nabilasurbakti91@gmail.com⁴, romianasitumorang04@gmail.com⁵, yosikasilaen5@gmail.com⁶, yuniyolandasitumorang15@gmail.com⁷, anggia@unimed.ac.id⁸, lilitans@unimed.ac.id⁹

Article Info

Received : 05-03-2025
Revised : 07-03-2025
Accepted : 09-03-2025
Published: 11-03-2025

Abstract

Inclusive education is an approach that provides equal opportunities for all learners, including children with special needs (ABK), to access quality education. Although there are regulations supporting inclusive education in Indonesia, the implementation on the ground shows various challenges, especially regarding the limitations of facilities and infrastructure that support accessibility for ABK. This research aims to describe the challenges and issues of accessibility to facilities and infrastructure in inclusive education, focusing on physical infrastructure and learning aids. Based on a literature review, it was found that many inclusive schools in Indonesia still lack disability-friendly facilities, such as suitable ramps, learning aids like Braille books, and adaptive technology devices. Additionally, other challenges include limited training for teachers, insufficient funding, and social resistance to the presence of ABK in regular schools. This study also identifies the role of technology as a solution to enhance accessibility in inclusive education, through the use of assistive technology tools and educational applications that can be tailored to the needs of ABK students. The recommendations proposed include improving the quality of physical infrastructure, providing adequate learning aids, offering professional training for teachers, and conducting more intensive socialization on the benefits of inclusive education. The results of this study are expected to provide insights and recommendations that can be useful for improving the implementation of inclusive education in Indonesia.

Keywords: *inclusive education, children with special needs, accessibility*

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Meskipun telah ada regulasi yang mendukung pendidikan inklusif di Indonesia, implementasi di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi ABK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan dan permasalahan aksesibilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif, dengan fokus pada infrastruktur fisik dan alat bantu pembelajaran. Berdasarkan kajian literatur, ditemukan bahwa banyak sekolah inklusi di Indonesia belum memiliki fasilitas yang ramah disabilitas, seperti jalur landai yang sesuai, alat bantu pembelajaran seperti buku braille, serta perangkat teknologi adaptif. Selain itu, tantangan lainnya meliputi keterbatasan pelatihan bagi guru, kurangnya anggaran, dan resistensi sosial terhadap keberadaan ABK di sekolah reguler. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan inklusif, dengan penggunaan alat bantu teknologi dan aplikasi pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK. Rekomendasi yang diusulkan antara lain peningkatan



kualitas infrastruktur fisik, penyediaan alat bantu pembelajaran yang memadai, pelatihan profesional untuk guru, dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat pendidikan inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, aksesibilitas

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisiknya. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi sarana dalam mengembangkan potensi serta membangun karakter individu. Menurut Belkacem TAIEB (dalam Matusov, 2020), pendidikan harus menjadi hubungan yang tulus antara siswa dan guru guna menemukan, mengembangkan, dan mempertahankan pertumbuhan pribadi. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan harus mampu mengakomodasi seluruh peserta didik dengan latar belakang yang beragam, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), agar mereka dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan setara bagi seluruh masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah pendidikan inklusif yang diatur dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 1. Dalam regulasi ini, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kelainan dan/atau potensi kecerdasan serta bakat istimewa, untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkungan yang sama dengan peserta didik pada umumnya (Amaliani, 2024). Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan setara bagi semua siswa tanpa diskriminasi.

Dalam praktiknya, pendidikan inklusif merupakan sistem yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima layanan pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun linguistik mereka (Eka Sari Setianingsih, 2019). Lebih dari sekadar integrasi siswa berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler, pendidikan inklusif juga mencakup adaptasi kurikulum, pengelolaan lingkungan sekolah, serta pengembangan interaksi sosial yang mendukung keberagaman (Muhibbin, 2021). Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus belajar dalam satuan pendidikan formal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Salah satu faktor utama dalam keberhasilan pendidikan inklusif adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan inklusif harus dirancang agar dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, maupun intelektual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 42 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur serta berkelanjutan (Ananda & Banurea, 2017). Sarana pendidikan mencakup berbagai fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses belajar-mengajar, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik keterampilan. Sementara itu, prasarana pendidikan mencakup



fasilitas yang tidak digunakan secara langsung dalam pembelajaran, tetapi berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan, seperti ruang kantor, kantin, jalan menuju sekolah, toilet, ruang kesehatan, ruang guru, serta tempat parkir kendaraan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan inklusif, sarana dan prasarana yang disediakan harus mencakup berbagai fasilitas fisik dan non-fisik yang dapat menunjang kebutuhan belajar ABK. Fasilitas fisik meliputi aksesibilitas bangunan sekolah, seperti jalur landai, pegangan tangan, toilet ramah disabilitas, serta ruang kelas yang didesain agar menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung interaksi sosial. Selain itu, penyediaan alat bantu pembelajaran, seperti perangkat teknologi adaptif, buku dalam format braille, serta alat komunikasi augmentatif, menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif. Namun, meskipun regulasi telah mengatur standar pendidikan inklusif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang sesuai, baik karena keterbatasan anggaran maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya aksesibilitas bagi ABK.

Penyediaan sarana dan prasarana yang inklusif tidak hanya bertujuan untuk mempermudah akses bagi ABK, tetapi juga meningkatkan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, peserta didik dapat belajar secara lebih optimal tanpa hambatan fisik atau teknis yang dapat menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana sekolah-sekolah inklusi telah menyediakan sarana dan prasarana yang benar-benar mendukung pendidikan inklusif, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya.

Artikel ini akan mengkaji aksesibilitas sarana dan prasarana dalam implementasi sekolah inklusi di Indonesia. Kajian ini akan berfokus pada penilaian terhadap fasilitas yang tersedia di sekolah inklusi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ABK atau belum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi sekolah dalam menyediakan fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif. Dengan memahami berbagai kendala yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan inklusif, sehingga tercipta lingkungan belajar yang setara, ramah, dan nyaman bagi semua peserta didik.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan menggunakan penelitian literatur, yaitu kajian pustaka.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi literatur. Nazir (dalam Putrihapsari dan Fauziah, 2020) mengartikan studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai kajian kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Tujuan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai langkah awal dalam perencanaan pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data dilapangan tanpa perlu terjun secara langsung. Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang relevan sebagai sumber data primer (data hasil penelitian, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sebagainya.), dan sumber data sekunder (peraturan dasar hukum pemerintah, buku, dll).

Penggunaan metode kajian kepustakaan dalam penelitian ini untuk mendeskriptifkan tentang permasalahan aksesibilitas sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan anak



berkebutuhan khusus dalam Pendidikan inklusi. Adapun prosedur dalam kajian kepustakaan atau studi pustaka yaitu : a) Menentukan topik penelitian; b) Menggali data; c) Menentukan titik pusat penelitian; d) Mengumpulkan berbagai kajian literatur; e) Mempersiapkan penyampaian data; dan f) Menuliskan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sekolah Inklusi dan Tantangan Aksesibilitas

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu, terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, atau emosionalnya, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan melalui berbagai regulasi, seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar inklusivitas secara optimal (Amaliani et al., 2024). Masalah utama yang sering muncul adalah keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari segi infrastruktur, alat bantu pembelajaran, maupun anggaran.

a. Keterbatasan Infrastruktur Fisik

Salah satu kendala terbesar dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia adalah kurangnya fasilitas fisik yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas siswa ABK. Infrastruktur sekolah yang tidak ramah disabilitas menyebabkan kesulitan bagi siswa dalam menjalani aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah.

- 1) Pujiaty (2024) menemukan bahwa sebagian besar sekolah inklusi di Indonesia belum memiliki jalur akses yang ramah bagi siswa dengan keterbatasan mobilitas, seperti pengguna kursi roda. Kondisi ini menjadi hambatan besar dalam mobilitas siswa dan mengurangi kemandirian mereka dalam menjalani aktivitas di sekolah.
- 2) Arini (2021) dalam penelitiannya di Kota Banjarmasin mengidentifikasi bahwa dari lima sekolah inklusi yang diteliti, hanya satu sekolah yang memiliki jalur landai atau ramp. Namun, ramp tersebut masih memiliki kemiringan yang terlalu curam, sehingga tetap sulit digunakan oleh siswa dengan keterbatasan fisik. Selain itu, sebagian besar sekolah belum menyediakan fasilitas tambahan seperti pegangan tangan (handrail), kloset duduk, dan ruang asesmen yang dapat menunjang kebutuhan siswa ABK.
- 3) Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 648 Tahun 1998, disebutkan bahwa setiap bangunan publik, termasuk sekolah, harus memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak kendala di tingkat sekolah, terutama karena kurangnya pengawasan terhadap pembangunan fasilitas ramah disabilitas.

Dari kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan yang telah dibuat dengan implementasi di lapangan. Sekolah inklusi seharusnya memastikan bahwa semua infrastruktur mendukung kebutuhan ABK, bukan hanya dalam bentuk regulasi tetapi juga dalam penerapan nyata.



b. Kurangnya Alat Bantu Pembelajaran

Selain infrastruktur fisik, keterbatasan alat bantu pembelajaran juga menjadi faktor yang signifikan dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Siswa ABK memerlukan alat bantu khusus agar mereka dapat memahami materi dengan lebih baik dan mengikuti proses pembelajaran secara efektif.

- 1) Hermawan, Yaum, dan Megaswarie (2023) menemukan bahwa sebagian besar sekolah inklusi di Indonesia belum menyediakan alat bantu pembelajaran yang memadai. Beberapa alat bantu yang seharusnya tersedia, seperti buku braille untuk siswa tunanetra, perangkat teknologi adaptif, serta alat komunikasi augmentatif bagi siswa dengan gangguan bicara, masih sangat terbatas.
- 2) Arini (2021) juga mencatat bahwa meskipun beberapa sekolah telah memiliki alat bantu seperti hearing aids dan alat pembesar huruf untuk siswa dengan low vision, pemanfaatannya masih belum optimal. Banyak siswa enggan menggunakan alat tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaatnya, serta ketidaknyamanan dalam penggunaannya.
- 3) Andriani et al. (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu penyebab utama keterbatasan alat bantu pembelajaran adalah kurangnya dukungan finansial dan kesadaran dari pihak sekolah. Beberapa sekolah cenderung mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional lainnya dibandingkan dengan pengadaan alat bantu bagi ABK.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dikatakan bahwa penyediaan alat bantu pembelajaran memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan sekolah. Selain pengadaan, juga dibutuhkan pelatihan bagi guru dan siswa untuk memaksimalkan penggunaan alat bantu yang telah disediakan.

c. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tanpa anggaran yang memadai, sekolah sulit untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan ABK.

- 1) Julianti (2023) menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk sekolah inklusi, banyak sekolah yang masih mengalami keterbatasan dalam pengadaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan ABK.
- 2) Faozanudin & Sulistiani (2023) dalam studi mereka di Kabupaten Banyumas menemukan bahwa dari lima sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh dinas pendidikan, hanya dua sekolah yang memiliki fasilitas yang cukup memadai. Sekolah lainnya masih mengalami kendala dalam pengadaan alat bantu dan infrastruktur yang sesuai standar.
- 3) Konza dalam (Andriani, et al. 2024) menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada fasilitas fisik, tetapi juga mempengaruhi pelatihan guru dan staf sekolah. Banyak tenaga pendidik di sekolah inklusi yang belum memiliki pelatihan yang memadai dalam menangani siswa ABK.



Berdasarkan kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan inklusif harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional. Tanpa dukungan finansial yang memadai, pendidikan inklusif hanya akan menjadi konsep tanpa implementasi yang nyata.

2. Dampak Keterbatasan Sarana dan Prasarana terhadap Pembelajaran ABK

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pendidikan inklusif tidak hanya berdampak pada mobilitas siswa, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah.

a. Hambatan Mobilitas dan Kemandirian

Infrastruktur sekolah yang tidak mendukung aksesibilitas ABK menjadi salah satu tantangan utama dalam pendidikan inklusif. Pujiaty (2024) menemukan bahwa banyak sekolah inklusi di Indonesia belum memiliki jalur landai atau aksesibilitas yang memadai bagi siswa berkebutuhan khusus. Arini (2021) dalam penelitiannya di Banjarmasin juga menunjukkan bahwa hanya sedikit sekolah inklusi yang memiliki fasilitas pendukung seperti jalur landai dan pegangan tangan, sehingga siswa dengan keterbatasan mobilitas mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari di sekolah. Akibatnya, mereka menjadi lebih bergantung pada bantuan orang lain, yang dapat menghambat kemandirian mereka dalam lingkungan pendidikan.

b. Menurunnya Efektivitas Pembelajaran

Ketersediaan alat bantu pembelajaran yang masih sangat terbatas juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas pembelajaran bagi ABK. Hermawan, Yaum, dan Megaswarie (2023) menemukan bahwa sebagian besar sekolah inklusi belum memiliki alat bantu seperti buku braille untuk tunanetra, alat bantu dengar untuk tunarungu, serta perangkat teknologi adaptif. Hal ini membuat siswa ABK kesulitan memahami materi pelajaran secara optimal. Arini (2021) juga mencatat bahwa meskipun beberapa sekolah memiliki alat bantu, penggunaannya masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaatnya serta kurangnya kenyamanan siswa dalam menggunakannya.

c. Kurangnya Partisipasi dalam Kegiatan Sekolah

Minimnya fasilitas pendukung tidak hanya berdampak pada pembelajaran di dalam kelas tetapi juga membatasi partisipasi ABK dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sosial. Konza (dalam Andriani et al., 2024) menekankan bahwa keterbatasan fasilitas menyebabkan siswa ABK kurang terlibat dalam berbagai aktivitas sekolah, yang pada akhirnya dapat membuat mereka merasa terisolasi. Tanpa lingkungan yang mendukung, mereka sulit untuk mengembangkan keterampilan sosial dan mengalami pengalaman belajar yang holistik.

d. Ketimpangan dalam Penerapan Pendidikan Inklusif

Beberapa sekolah inklusi mengalami kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif karena keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya. Faozanudin & Sulistiani (2023) menemukan bahwa hanya dua dari lima sekolah inklusi yang memiliki fasilitas yang cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Julianti (2023) juga menyebutkan



bahwa alokasi dana untuk pendidikan inklusif sering kali tidak digunakan secara efektif, sehingga banyak sekolah masih mengalami kekurangan fasilitas dasar.

3. Saran untuk Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa faktor kebijakan, kapasitas tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas, serta kesadaran masyarakat menjadi aspek kunci dalam mewujudkan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif melalui saran berikut.

a. Optimalisasi Kebijakan dan Penganggaran

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 telah mengatur pendidikan inklusif, implementasinya masih belum optimal akibat kurangnya pengawasan dan pendistribusian anggaran yang merata. Faozanudin & Sulistiani (2023) menemukan bahwa di Kabupaten Banyumas, hanya dua dari lima sekolah inklusi yang memiliki fasilitas memadai, menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi sumber daya. Julianti (2023) juga menyoroti bahwa anggaran pendidikan inklusif sering kali tidak digunakan secara efektif, mengakibatkan banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas dasar. Selain itu, Konza (dalam Andriani, et al. 2024) menekankan bahwa sistem penganggaran pendidikan inklusif harus berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan proyek jangka pendek agar fasilitas dapat terus diperbarui dan berkembang sesuai kebutuhan ABK. Adapun saran yang dapat diberikan ialah:

- 1) Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran pendidikan inklusif dialokasikan secara transparan dan diawasi agar digunakan sesuai kebutuhan.
- 2) Dinas pendidikan di tingkat daerah perlu aktif dalam memastikan sekolah-sekolah inklusi mendapatkan sumber daya yang cukup tanpa adanya ketimpangan.
- 3) Sekolah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendanaan guna meningkatkan fasilitas pendidikan inklusif.

b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik

Penelitian menunjukkan bahwa banyak guru di sekolah inklusi belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam menerapkan metode pembelajaran bagi siswa ABK. Amaliani et al. (2024) menemukan bahwa salah satu penyebab utama tidak optimalnya pendidikan inklusif adalah kurangnya pelatihan bagi guru, sehingga mereka masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Ridha (2020) juga menyoroti bahwa banyak tenaga pendidik belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan khusus setiap siswa, menyebabkan ketidaksesuaian dalam pendekatan pembelajaran. Konza (dalam Andriani, et al. 2024) menegaskan bahwa guru yang telah mendapatkan pelatihan cenderung lebih percaya diri dalam mengajar siswa ABK dan mampu menyesuaikan strategi pembelajaran mereka agar lebih efektif. Adapun saran yang dapat diberikan ialah:



- 1) Pemerintah harus secara rutin mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi guru yang mengajar di sekolah inklusi.
- 2) Sekolah dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menangani siswa ABK.
- 3) Pelatihan tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk staf sekolah, seperti petugas administrasi dan tenaga kebersihan, agar mereka lebih memahami kebutuhan siswa ABK di lingkungan sekolah.

c. Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Sekolah

Fasilitas yang kurang memadai masih menjadi kendala utama dalam pendidikan inklusif. Arini (2021) menemukan bahwa banyak sekolah tidak memiliki jalur landai, pegangan tangan, atau toilet ramah disabilitas, sehingga menyulitkan siswa ABK dalam beraktivitas. Pujiaty (2024) juga mencatat bahwa banyak sekolah belum memiliki alat bantu pembelajaran seperti buku braille dan perangkat teknologi adaptif, yang seharusnya menjadi bagian dari fasilitas standar di sekolah inklusi. Andriani et al. (2024) menegaskan bahwa sekolah inklusi seharusnya memiliki infrastruktur yang mendukung kemandirian siswa ABK, bukan hanya sekadar menyediakan fasilitas seadanya. Adapun saran yang dapat diberikan ialah:

- 1) Pemerintah harus memastikan bahwa setiap sekolah inklusi memiliki standar minimum fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi ABK, seperti jalur landai, toilet ramah disabilitas, dan ruang kelas yang dirancang untuk kebutuhan siswa.
- 2) Sekolah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk perawatan dan pengembangan fasilitas yang sudah ada agar tetap berfungsi optimal.
- 3) Pihak sekolah perlu menggandeng komunitas dan perusahaan lokal untuk mendukung pengadaan fasilitas pendidikan inklusif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

d. Penguatan Kesadaran dan Kerjasama yang Baik

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif masih tergolong rendah, yang berkontribusi pada lambatnya perkembangan sekolah inklusi di Indonesia. Andriani et al. (2024) menemukan bahwa banyak orang tua masih memiliki stigma terhadap pendidikan inklusif dan lebih memilih menyekolahkan anak mereka di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ridha (2020) menyoroti bahwa kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan menerima keberagaman siswa. Konza (dalam Andriani, et al. 2024) menekankan bahwa tanpa dukungan dari komunitas dan kesadaran kolektif, kebijakan pendidikan inklusif tidak akan berjalan efektif. Adapun saran yang dapat diberikan ialah:

- 1) Sekolah perlu mengadakan sosialisasi secara rutin kepada orang tua siswa mengenai pentingnya pendidikan inklusif dan manfaatnya bagi perkembangan anak.
- 2) Pemerintah dan organisasi sosial harus aktif mengkampanyekan pentingnya pendidikan inklusif melalui berbagai media, seperti seminar, iklan layanan masyarakat, dan media sosial.



- 3) Kolaborasi antara sekolah inklusi, SLB, dan lembaga pendidikan lainnya dapat membantu meningkatkan pertukaran informasi dan metode pembelajaran terbaik bagi siswa ABK.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan infrastruktur fisik, minimnya alat bantu pembelajaran, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada penyediaan fasilitas dan pelatihan tenaga pendidik.

Kurangnya aksesibilitas ini menyebabkan hambatan dalam mobilitas, efektivitas pembelajaran, serta partisipasi sosial bagi ABK di lingkungan sekolah inklusi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta penguatan anggaran dan infrastruktur agar sekolah inklusi benar-benar mampu mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, setara, dan mendukung kebutuhan semua peserta didik tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliani, R., Yunitasari, S. E., Fajriah, D., Salmiani, S., & Gustini, E. (2024). Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi “Kunci Sukses Pendidikan Inklusi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 10(1), 361-366.
- Andriani, O., Saputra, D. A., Sulisty, K. T., & Sari, L. N. (2024). Sarana Dan Prasarana (Fasilitas) Pendidikan Bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 105-114.
- Ananda, R., & Banurea, O. K. (2017). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Widya Puspita.
- Arini, A. (2021). Pemenuhan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Kota Banjarmasin. *Jurnal pendidikan, sosial dan Budaya*, 4(6), 121.
- Eka Sari Setianingsih, I. L. (2019). Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di SD Bina Harapan Semarang. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 257–268
- Faozanudin, M., & Sulistiani, L. (2023). Tantangan Implementasi Pendidikan Dasar Inklusi Di Kabupaten Banyumas. *Indopedia (Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan)*, 1(1), 107-118.
- Hermawan, A., Yaum, L. A., & Megaswarie, R. N. (2023). Penerapan Aplikasi Talkback dalam Pelaksanaan Pembelajaran Siswa Tunanetra Kelas XI di SLB Negeri Branjangan Jember. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 109-116.
- Julianti, K. (2023). Model Pendidikan Inklusi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam: Studi Multisitus SDIT Luqman Al-Hakim dan SDIT Assalaam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6 (10), 1371-1383.
- Muhibbin, M. A. (2021). Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92–102.
- Pujiaty, E. (2024). Strategi pengelolaan pendidikan inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas di sekolah dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(2), 241-252.



Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini pada Ibu yang Bekerja : Sebuah Studi Literatur. *VISI : Jurnal Ilmiah PTK PNF*, 15(2), 127–136.

Ridha, A. N. (2020). *Manajemen Prasarana Untuk Anak Disabilitas Di Pendidikan Inklusif*.